

# ISU IMIGRAN GELAP DALAM HUBUNGAN BILATERAL AUSTRALIA-INDONESIA

Sita Hidriyah\*)



## Abstrak

*Perdana Menteri (PM) Australia yang baru terpilih, Tony Abbott melakukan kunjungan luar negeri perdananya ke Indonesia. Kunjungan itu merupakan kunjungan luar negeri pertama sejak PM Abbott dilantik pada 18 September 2013. Dalam kesempatan pertemuan bilateral kali ini, Presiden RI dengan PM Australia membahas isu-isu yang menjadi prioritas bersama sesuai dengan kerangka kemitraan komprehensif. Isu utama adalah permasalahan imigran gelap dari Indonesia ke Australia. Kunjungan ini diharapkan bermanfaat dalam mendorong lebih lanjut kerja sama antara dua negara, khususnya dalam permasalahan imigran gelap.*

## A. Pendahuluan

PM Australia yang baru terpilih, Tony Abbott bertolak ke Jakarta untuk kunjungan selama dua hari pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 2013. Kunjungan tersebut merupakan lawatan pertama Abbott ke luar negeri sebagai PM Australia. Kedatangan PM baru ini bertepatan dengan maraknya kasus tenggelamnya perahu pencari suaka ke Australia. Kasus terakhir terjadi 27 September lalu yang menewaskan sedikitnya 31 orang setelah kapal yang mereka tumpangi karam di laut lepas.

Kedatangan PM Abbott ke Indonesia merupakan bukti bahwa ia mulai memenuhi janji-janji kampanyenya untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan kunjungan kenegaraan yang pertama. Sebelumnya PM Abbott pernah berkunjung ke Indonesia pada Oktober 2012 dalam kapasitasnya sebagai ketua oposisi di parlemen Australia. Ketetapan PM Abbott untuk memulai masa pemerintahannya dengan melakukan lawatan ke Indonesia mencerminkan semangat untuk melanjutkan dan bahkan memperkuat kerja sama di antara kedua negara. Hal ini menandakan suatu ketetapan yang diapresiasi mengingat posisi kawasan kedua negara yang berdekatan.

\*) Peneliti bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: sita.hidriyah@dpr.go.id



## B. Tujuan Kunjungan Perdana PM Australia

PM Australia memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi karena menganggap hubungan kedua negara bertetangga sangat penting. Selain itu, ada kepentingan ekonomi, karena Indonesia adalah anggota G-20 dan pemimpin ASEAN yang tidak dapat diabaikan. PM Abbott mengatakan saat ini rata-rata nilai perdagangan Indonesia dengan Australia baru AUS\$15 miliar. Jumlah ini masih di bawah perdagangan Australia dengan Selandia Baru yang tercatat AUS\$250 miliar. Padahal, PM Abbott menekankan populasi Selandia Baru hanya sekitar empat juta orang. Sementara jumlah penduduk Indonesia jauh lebih banyak sekitar 240 juta jiwa. Dengan kondisi tersebut, masih banyak potensi yang dapat dikembangkan. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan idealnya transaksi perdagangan kedua negara mencapai satu persen dari total produk domestik bruto kedua negara yang mencapai AUS\$250 triliun. Hal ini berarti idealnya neraca perdagangan kedua negara sekitar US\$2,5 miliar. Karena itu, dalam kunjungannya kali ini ia didampingi oleh Menteri Perdagangan Andrew Robb serta 20 pemimpin bisnis Australia.

Selain isu perdagangan, isu yang tidak kalah penting adalah masalah penyelundupan manusia. Dalam pertemuan kedua pemimpin negara, PM Abbott langsung membicarakan isu yang juga ia janjikan di masa kampanye pemilunya, yakni mencari solusi bagi masalah penyelundupan manusia yang selama ini dianggap sangat memusingkan Australia. Dalam masa kampanyenya, PM Abbott telah menyiapkan Operasi *Borders Sovereign*. Operasi ini merupakan operasi nasional menangani imigran gelap yang datang dari perairan Indonesia. Operasi tersebut, *pertama*, menggunakan armada militer angkatan laut. Pasukan ini berjaga di perairan perbatasan dua negara. Penjaga laut itu akan menangkap para imigran gelap lalu mengembalikannya ke perairan Indonesia. *Kedua*, dengan membayar nelayan Indonesia untuk kembali membawa imigran ke perairan Indonesia.

Kebijakan ini dikampanyekan PM Abbott mengingat selama satu setengah tahun terakhir, tidak kurang dari 19 ribu imigran gelap tiba di Australia. Sebagian di antaranya tewas ditelan gelombang laut lepas Australia. Para pencari suaka pun jumlahnya terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pengungsi Australia, pada 2004–2005 tercatat delapan perahu dengan 61 imigran. Pada 2008–2009 mulai meningkat menjadi 23 perahu dengan 985 imigran. Pada 2009–2010, ada 117 perahu dengan 4.370 imigran dan 2011–2012 sebanyak 110 perahu dengan 7.983 imigran. Kebijakan PM Abbott ini ditentang Partai Buruh karena akan menjadi petaka diplomatik dengan Indonesia.

Dalam jumpa pers bersama, PM Australia Tony Abbott menegaskan Australia akan mempererat kerja sama bilateral dengan Indonesia untuk mengakhiri kejahatan penyelundupan manusia. PM Abbott mengungkapkan, diskusinya dengan SBY terkait isu penyelundupan manusia sangat konstruktif. Banyak detail yang harus diselesaikan. Nantinya akan dicoba diselesaikan pada tingkat menteri. Namun kedua negara bertekad bersama serta bersatu untuk mengatasi masalah ini dan untuk mencari solusi, baik yang melalui darat, laut, maupun perbatasan kedua negara. Intinya adalah bahwa kedua negara bertekad untuk mengakhiri kejahatan seperti ini.

Pemerintahan PM Abbott menyiapkan US\$420 juta untuk menghentikan penyelundupan manusia. Sebanyak US\$20 juta akan digunakan untuk membeli perahu nelayan pembawa imigran. Sementara jutaan dolar AS lainnya dalam bentuk bantuan dan informasi soal pencari suaka. Dalam jumpa pers, PM Abbott tidak menyinggung isu sensitif yang sempat berkembang sebelumnya, bahwa Australia dalam penanganan manusia perahu, tidak hanya akan mengembalikan perahu dan pengungsi ke Indonesia. Australia juga akan menghadang perahu yang membawa pengungsi dengan menempatkan polisi Australia di Indonesia. Sebaliknya, PM Abbott menegaskan bahwa Australia sangat menghormati kedaulatan Indonesia. Sedangkan

terkait isu Papua misalnya, ia pun menyatakan Australia tidak mendukung siapa pun yang ingin menggunakan Australia sebagai tempat untuk mengganggu kedaulatan Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyampaikan kesamaan pandangan antara Indonesia dan Australia bahwa kedua negara merupakan korban dari kejahatan penyelundupan manusia. Para imigran menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk menuju perairan Australia. Akibatnya, banyak sekali warga negara dari Timur Tengah dan negara lain yang datang ke Indonesia, memberikan beban ke Indonesia, baik sosial maupun ekonomi.

### **C. Permasalahan Imigran Gelap ke Australia**

Permasalahan imigran gelap belum akan selesai dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia dan Australia. Banyak pihak menilai jika kunjungan PM Abbott ke Jakarta tidak dapat menyelesaikan fenomena manusia perahu begitu saja. Hal ini dikarenakan masalah imigran gelap telah terjadi sejak beberapa dekade lalu akibat berbagai kejadian di negara lain seperti konflik perang, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ataupun kemiskinan.

Indonesia menjadi negara transit dalam perjalanan menuju Australia. Tidak sedikit dari kapal-kapal yang ditumpangi imigran gelap tersebut karam sebelum sampai tujuan, Australia. Peristiwa terakhir yaitu pada 27 September 2013 di mana sebuah kapal yang mengangkut sekitar 80 imigran gelap tenggelam di perairan Cianjur, Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, 41 orang imigran gelap meninggal, 23 selamat dan sisanya hilang. Beberapa hari sebelumnya, mereka bertolak ke kawasan pelabuhan di wilayah Banten untuk menyeberang secara gelap ke wilayah Australia. Mereka berangkat ke Banten dengan menumpang tujuh kendaraan roda empat. Setiba di sebuah pantai di Banten, para imigran asal Irak, Libanon, dan negeri Timur Tengah lainnya tersebut menumpang kapal tongkang

untuk menyeberang ke perairan Australia. Di tengah laut, nakhoda meninggalkan kapal setelah menerima uang dari para imigran dengan menggunakan perahu kecil. Kapal akhirnya dikemudikan sendiri oleh imigran yang mampu mengemudi. Namun kemudian mereka terombang-ambing sekitar lima hari di laut hingga kehabisan solar dan akhirnya kapal pecah di perairan Agrabinta, Cianjur.

Permasalahan imigran gelap tidak hanya dibicarakan oleh kedua negara kali ini saja. Presiden SBY pernah bertemu dengan PM Australia terdahulu yaitu Kevin Rudd pada tahun 2012 dan menjelaskan jika Pemerintah Indonesia dengan Australia sepakat menjadikan masalah imigran gelap sebagai masalah bersama, bukan hanya dibebankan pada negara Indonesia maupun Australia. Kedua negara sepakat bahwa Kevin Rudd dan SBY mempunyai pandangan yang sama yaitu semua pihak harus ikut tanggung jawab dan harus lakukan tindakan konkret. Tidaklah adil kalau ini hanya dibebankan ke Indonesia atau Australia saja. Harus disadari, jika perlu ada kerja sama bilateral lebih erat untuk mencari solusi masalah itu.

Australia selama ini menjadi tujuan utama pengungsi dari negara-negara konflik. Hal tersebut dikarenakan Australia telah memiliki hukum yang mengatur soal pengungsi. Australia juga menandatangani Konvensi Pengungsi pada tahun 1951. Konvensi itu membuat Australia harus menerima pengungsi yang datang ke negaranya.

Di lain pihak Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi Genewa 1951 dan Protokol 1967 terkait penanganan pengungsi. Walaupun tidak menjadi negara tujuan pengungsi, secara posisi geografis Indonesia membuat para pengungsi harus melewatinya terlebih dahulu sebelum mencapai Australia sehingga penting sebagai negara transit.

Pertemuan pemimpin kedua negara ini bukan untuk mendiskusikan secara detail kegiatan operasional serta cara kerja sama untuk mengatasi masalah imigran ilegal. Direncanakan ada forum lebih lanjut. Secara jelas, baik PM Australia maupun Presiden SBY berkomitmen untuk menyelesaikan masalah

ini sebaik-baiknya. Terlihat jelas bahwa Indonesia dan Australia melihat isu pencari suaka sebagai masalah bersama. Oleh karena itu, respons yang diberikan kepada kedua negara juga harus diletakkan dalam kerangka kerja sama. Selanjutnya yang diperlukan adalah pembahasan detail di tingkat teknis untuk menuntaskan persoalan penyelundupan manusia. Kedatangan PM Abbott memberi harapan akan semangat untuk mengakhiri kejahatan penyelundupan manusia dalam kerja sama yang efektif, tepat, dan baik.

#### D. Penutup

Permasalahan penyelundupan imigran gelap merupakan persoalan pelik yang harus dicari jalan keluarnya. Hal ini perlu menjadi perhatian, bukan saja oleh Indonesia tapi negara-negara dalam kawasan ASEAN untuk menjadi salah satu agenda pembicaraan pada tingkat Internasional, sehingga ditemukan solusi bersama. Masalah penyelundupan manusia harus diselesaikan karena ini terkait masalah kedaulatan negara. Penyelundupan manusia juga merupakan bencana kemanusiaan, Bagaimanapun, para korban juga manusia yang punya hak untuk hidup. Oleh karena itu, negara asal serta negara tujuan para imigran perlu membahas masalah ini secara bersama-sama.

Dalam mengatasi hal ini DPR-RI dapat mendorong Pemerintah Indonesia bertindak sebagai inisiator pembahasan masalah imigran gelap di forum internasional. Salah satu kepentingan Indonesia dalam masalah imigran gelap adalah pembagian tanggung jawab antara negara sumber, negara transit, dan negara tujuan para imigran gelap. Pemerintah pun terus mendorong terciptanya kerja sama antara negara-negara Asia Pasifik untuk mengatasi masalah imigran gelap. Indonesia dapat menjadi tuan rumah forum internasional yang membahas tentang masalah imigran. Selama ini tidak ada mekanisme yang komprehensif di kawasan Asia Pasifik untuk mengatasi masalah imigran gelap. Diharapkan, adanya kerja sama internasional dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Indonesia telah berusaha terus-menerus mengatasi masalah ini, demikian juga Australia. Tapi akan lebih baik apabila ada kerja sama bilateral berdasarkan *Bali Process* untuk mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya, mengingat pertemuan tersebut diklaim telah memberikan kontribusi positif, khususnya pada aspek peningkatan kapasitas dan peningkatan jejaring antarpemangku kepentingan di kawasan terkait kerja sama penanggulangan penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan lintas negara.

DPR-RI juga harus meminta pemerintah untuk memperkuat patroli laut agar laut Indonesia aman dari kejahatan transnasional ini. Indonesia memang negara laut yang memungkinkan banyaknya 'jalan tikus' yang mudah dilalui oleh para imigran gelap. Oleh karenanya, perlu penguatan pengawasan laut. DPR-RI harus secara tegas mengingatkan agar dalam pembahasan masalah ini Pemerintah Indonesia mengedepankan kedaulatan negara.

#### Rujukan:

1. "Perangi Imigran Ilegal," *Republika*, 1 Oktober 2013.
2. "Indonesia-Australia Setop Manusia Perahu," *Media Indonesia*, 1 Oktober 2013.
3. "RI-Australia Atasi Bersama," *Kompas*, 1 Oktober 2013.
4. "Makin Banyak Pengungsi Terdampar Di Indonesia," <http://www.dw.de/a-16557914>, diakses 4 Oktober 2013.
5. "SBY-Abbott Cari Solusi Bersama Permasalahan Pencari Suaka," <http://www.beritasatu.com/asia/141377.html>, diakses 3 Oktober 2013.
6. "Pencari Suaka: Kerikil Hubungan RI-Australia," <http://www.dw.de/a-17124275>, diakses 3 Oktober 2013.
7. "Indonesia Dan Australia SEPAKAT, Imigran Gelap Persoalan Bersama," <http://nasional.sindonews.com/read/2013/07/05/15/757910/>, diakses 3 Oktober 2013.
8. "Hari Ini, Presiden Terima Kunjungan PM Australia," <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/09/30/1/185011>, diakses 4 Oktober 2013.